

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah penerapan rencana yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Edward III dalam Tahir A. (2020:53) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terwujudnya *good governance* akan memberikan pelayanan publik yang mendorong pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat. Menurut Syafruddin dalam Widodo (2021:79) Pemerintah Daerah dibentuk oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan sebagai wujud dari proses demokrasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, yang mengutamakan keterlibatan masyarakat secara luas. Namun, realita di lapangan seringkali menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih belum optimal. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, berbagai metode komunikasi kini menjadi lebih efektif.

Pemerintah memperkenalkan konsep *E-Government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. E-Musrenbang menjadi bagian dari sistem *E-*

Government. Sistem elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan musrenbang.

E-Musrenbang pertama kali diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2014, yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan pengelolaan data usulan dari masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, sehingga suara dan kebutuhan masyarakat dapat lebih mudah diketahui dan diakomodasi dalam kebijakan pembangunan. (Winarni, 2018).

Berdasarkan observasi awal peneliti dari media masa diketahui bahwa Kota Lhokseumawe telah mengimplementasikan E-Musrenbang. Penggunaan sistem e-musrenbang sendiri didasari karena adanya permasalahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan, seperti kurangnya transparansi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Penerapan E-Musrenbang dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang efektif, partisipatif dan transparansi. (www.aceh.antaranews.com, 21 November 2024)

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mempercepat dan mendukung tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan data pembangunan Kota

Lhokseumawe tahun 2024, Cot Trieng menduduki status berkembang dalam pengembangan *e-government*, dan E-Musrenbang belum menunjukkan efektifitas.

Tabel 1. 1
Hasil Usulan E-Musrenbang Gampong

NO	USULAN GAMPONG	KETERANGAN
1	Lanjutan pembangunan Mesjid Darul	Disetujui
2	Peningkatan/pelebaran tanggul krueng di dusun b	Tidak Diakomodir
3	Pembangunan saluran distribusi persawahan	Disetujui
4	Pembangunan sumur bor air dangkal tanah sektor pertanian	Tidak Diakomodir
5	Pembangunan talud	Disetujui
6	Peningkatan jalan di dusun b	Tidak Diakomodir
7	Bantuan sosial usaha mikro kelompok	Tidak Diakomodir
8	Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Tidak Diakomodir
9	Pengadaan bibit tanaman	Tidak Diakomodir

Sumber: Hasil Usulan E-Musrenbang Cot Trieng 2025

Data tersebut menunjukkan usulan dari *Gampong* Cot Trieng, namun yang disetujui hanya berdasarkan Keputusan pemerintah. E-Musrenbang yang dilaksanakan oleh *Gampong* Cot Trieng masih dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Meskipun Musrenbang tampak seperti forum partisipatif, kenyataannya pengambilan keputusan dan dominasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, bukan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan, karena keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, akan memberikan akses informasi kepada masyarakat untuk mengetahui suatu program pembangunan yang sedang dijalankan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat ke pihak pemerintah.

Gambar 1. 1
Sistem E-Musrenbang

Alat	Kode Usulan	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ka	Status
	2146768	31-01-2025	Keuchik Ujong Pacu	Pembangunan/Pengaspalan Jalan	Pembangunan/penimbunan jalan Dusun C jalan lintas tembus ke jalan len sekitar 300 M	Dusun C, Kota Lhokseumawe	Muara Satu	Ujong Pacu	Kabupaten / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
	2147319	31-01-2025	Keuchik Ujong Pacu	Rehab Bangunan Gedung	Rehab Meunasah (menasah kami sekarang sudah tidak bisa digunakan saat hujan sering bocor)	Dusun A, Kota Lhokseumawe	Muara Satu	Ujong Pacu	Kabupaten / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
	2150518	31-01-2025	Keuchik Paritang Sakti	Pembangunan Drainase/Saluran Perkotaan	Pembangunan Plat Beton/Tutup Saluran Dusun Tpk Seumatang Panjang Saluran 100 Meter	Dusun Cdt, Suwe, Kota Lhokseumawe	Muara Satu	Padang Sekti	Kabupaten / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
	2153323	31-01-2025	Keuchik Paloh Puntir	Pembangunan/Pengaspalan Jalan	Pembangunan Pengaspalan Jalan 1 hnh Kreut sei File Explorer 500 M	Dusun A, Kota Lhokseumawe	Muara Satu	Paloh Puntir	Kabupaten / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

Sumber: Website E-Musrenbang Lhokseumawe 2025

Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam sistem E-Musrenbang hanya dapat diakses oleh pemerintah setempat, setelah usulan tersebut berhasil diajukan kepusat melalui sistem E-musrenbang. Otomatis akan keluar hasil usulan yang disetujui maupun ditolak. Namun, hasil dari usulan yang telah disetujui, tidak dapat dilihat oleh masyarakat langsung.

Hal tersebut mengidentifikasi bahwa dalam implementasi E-Musrenbang, hanya pemerintah saja yang diuntungkan dan masyarakat belum merasakan manfaatnya secara khusus. Hal itu dikarenakan, masyarakat tidak dapat mengetahui usulan pembangunan mana yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Artinya masyarakat hanya dapat bertanya langsung kepada pemerintah untuk dapat mengetahui apakah usulan tersebut ditolak ataupun disetujui. Dengan teknologi yang semakin berkembang, E-Musrenbang harus menjadi program yang mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Rahmi, selaku Kasi Bidang Pembangunan Kecamatan Muara Satu, mengatakan bahwa telah dilakukannya

sosialisasi yang dilakukan kepada setiap operator *gampong* terkait E-Musrenbang. Selanjutnya, sering dihadapi gagal login yaitu karena Server yang digunakan untuk mendukung akses sistem, mengalami kelebihan beban (*overload*). Hal ini terjadi ketika banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan, melebihi kapasitas server untuk memproses permintaan. Akibatnya, kinerja sistem menjadi lambat atau bahkan gagal diakses. (Wawancara awal, 18 November 2024)

Berdasarkan wawancara kedua dengan Ibu Rika, selaku Operator *Gampong* Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi terkait E-Musrenbang ke masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan sampai saat ini hanya pihak operator yang diizinkan untuk mengakses E-Musrenbang. Masyarakat harus bertanya langsung ketika ingin mengetahui langsung progress usulan tersebut. Sistem e-musrenbang sering terjadi gangguan, masalah ini bisa disebabkan oleh infrastruktur jaringan yang kurang memadai. (Wawancara Tambahan, 11 April 2025)

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dipahami bahwa Pernyataan tersebut menyoroti keterbatasan dalam proses sosialisasi program, yang hanya melibatkan operator atau perwakilan *gampong* tanpa menjangkau masyarakat secara langsung. Sosialisasi yang hanya ditujukan kepada operator atau perwakilan *gampong*, maka informasi tentang program tidak tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan masyarakat tentang program yang sedang dijalankan. E-Musrenbang merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah secara online. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan efisiensi waktu dalam proses perencanaan

pembangunan daerah. Namun, implementasi E-Musrenbang di *Gampong* Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe masih menghadapi tantangan. Meskipun *gampong* ini telah mengimplementasikan E-Musrenbang, masih ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur TIK dan rendahnya keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam menggunakan sistem E-Musrenbang.

Keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di *Gampong* Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang). Infrastruktur TIK yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran implementasi E-Musrenbang, karena sistem ini memerlukan akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai untuk dapat berfungsi dengan baik. Namun sayangnya, infrastruktur TIK di *Gampong* Cot Trieng masih sangat terbatas. Akses internet di *gampong* ini masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat kota. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses sistem E-Musrenbang dan memasukkan usulan pembangunan. Selain itu, keterbatasan perangkat keras seperti komputer dan laptop juga menjadi masalah. Operator *Gampong* Cot Trieng lebih sering menggunakan fasilitas pribadi untuk melakukan penginputan data Pembangunan.

Selain keterbatasan akses internet, perangkat keras, dan fasilitas TIK, implementasi E-Musrenbang di *Gampong* Cot Trieng dihadapkan pada beberapa masalah infrastruktur lainnya, salah satu masalah infrastruktur yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan telekomunikasi. Jaringan yang kurang memadai di *Gampong* Cot Trieng bahkan jaringan dari operator telkomsel masih sangat sulit

digunakan, sedangkan untuk jaringan yang lainnya masih belum memadai. Jaringan telekomunikasi yang tidak stabil atau tidak memadai dapat menghambat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta sistem E-Musrenbang. Hal ini dapat menyebabkan informasi tidak dapat disampaikan dengan efektif, sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan.

Kurangnya infrastruktur di *Gampong Cot Trieng* menjadi permasalahan dalam penelitian ini, karena untuk dapat mengakses sistem E-Musrenbang dibutuhkan akses internet yang memadai dalam proses penginputan usulan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Pelaksanaan e-musrenbang harus dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang efektif partisipatif dan transparansi. E-Musrenbang harus dilakukan secara serius agar dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, persepsi masyarakat yang menganggap Musrenbang hanya sebatas formalitas dapat berubah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi E-Musrenbang di *Gampong Cot Trieng* Kecamatan Muara Satu.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi E-Musrenbang di *Gampong Cot Trieng* Kecamatan Muara Satu?
2. Apa saja penghambat implementasi E-Musrenbang di *Gampong Cot Trieng* Kecamatan Muara Satu?

1.3 Fokus Penelitian

1. Implementasi E-Musrenbang di *Gampong Cot Trieng* Kecamatan Muara Satu difokuskan kepada partisipasi masyarakat, transparansi informasi dan efektivitas sistem.
2. Penghambat dalam implementasi E-Musrenbang di *Gampong Cot Trieng* Kecamatan Muara Satu yang difokuskan kepada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi E-Musrenbang di *Gampong Cot Trieng* Kecamatan Muara Satu yang dilihat melalui partisipasi masyarakat, transparansi informasi, efektivitas sistem.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penghambat dalam implementasi E-Musrenbang di *Gampong Cot Trieng* Kecamatan Muara Satu dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pembangunan desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program E-Musrenbang di Kecamatan Muara Satu. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melihat tingkat partisipasi, transparansi dan efektivitas dalam implementasi elektronik musyawarah perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) di suatu Daerah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi E-Musrenbang di Kecamatan Muara Satu. Pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, baik yang dilakukan secara manual ataupun yang dilakukan secara online.